Korupsi Kuota Haji Naik Penyidikan .....

Dari Halaman 1

KPK pada Sabtu (9/8) pekan lalu resmi menaikkan status penanganan dugaan korupsi kuota haji dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Status penyidikan ditetapkan setelah KPK menggelar ekspose perkara.

"Terkait dengan perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Sabtu dini hari.

KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

"KPK menerbitkan Sprindik umum dengan pengenaan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana," ujar Asep.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di internal Kementerian Agama serta agen perjalanan haji dan umrah sudah diminta keterangannya oleh penyelidik KPK, diantaranya mantan Menteri Agama era Presiden RI ke-7 Joko Widodo Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta pegawai Kementerian Agama berinisial RFA, MAS, dan AM.

Kemudian Pendakwah Khalid Basalamah, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz.**(cnni/js)**

Prabowo Tegur Bupati Pati .....

Dari Halaman 1

tersebut.

"Di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang butuh perhatian lebih. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari tempat lain," ujarnya.

Sudaryono menyebut perintah Prabowo tersebut juga telah diikuti oleh Bupati Pati yang langsung membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen.

"Alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk dan sudah diumumkan di-cancel," katanya.

Lebih lanjut, Sudaryono memastikan setiap keluhan dari masyarakat akan selalu didengar oleh pemerintah ataupun Presiden Prabowo secara langsung.

Ia menyebut Presiden juga telah memerintahkan jajarannya untuk responsif terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Ini bukti tidak ada jarak antara rakyat dengan pemimpinnya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono lantas mengajak seluruh warga Pati untuk menjaga situasi kondusif menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

"Oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi dan dengan adanya 17 Agustus, Ulang Tahun negara kita yang ke-80 untuk menjaga kondusifitas," ujarnya.**(cnni/js)**

20 Prajurit TNI .....

Dari Halaman 1

perwira.

"Ada satu orang perwira (yang ikut jadi tersangka)," ujarnya tanpa menjelaskan pangkat dan jabatan perwira dimaksud.

Namun dia mengaku belum bisa menjelaskan motif dari kasus kekerasan yang menewaskan Prada Lucky. Hal tersebut, katanya, masih dalam proses pemeriksaan penyidik Polisi Militer Daerah Militer (Pom Dam) IX Udayana.

Dia berjanji akan mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut. Dan sebagai atasan langsung dari korban akan mengawal dan mengawasi proses hukum yang sedang berlangsung saat ini.

"Siapapun yang melakukan perbuatan (kekerasan) harus diusut dan tidak tanpa pandang bulu," tegasnya.

Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23) prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere (Yon TP 834/WM) Nagekeo tewas diduga akibat alami penyiksaan yang dilakukan oleh seniornya di dalam asrama batalyon.

Prada Lucky meninggal dunia pada Rabu (6/8). Dia sempat menjalani perawatan selama empat hari di Intensive Care Unit (ICU) RSUD Aeramo, Nagekeo.

Jenazahnya kemudian dibawa pulang ke Kupang setelah dijemput oleh orangtua kandungnya yakni Serma Kristian Namo dan Ibunya Sepriana Paulina Mirpey pada Kamis (7/8).**(cnni/js)**

PPATK Buka Blokir 100 Juta Rekening .....

Dari Halaman 1

(9/8).

Ivan menjelaskan PPATK telah memeriksa 122 juta rekening dormant selama 15 Mei-31 Juli. Selama pemblokiran, PPATK menghasilkan kategori rekening dormant berdasarkan tingkat risiko.

PPATK menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada otoritas berweang. Peta risiko hasil pengecekan rekening dormant akan menjadi rujukan pihak-pihak terkait.

Ivan berharap kebijakan ini dapat membuat nasabah terbebas dari jual beli rekening. Langkah ini juga diharapkan menghindarkan nasabah dari penyalahgunaan serta penyimpangan atas rekening dormant.

Ivan mengimbau masyarakat yang rekeningnya masih terblokir untuk mengunjungi kantor pusat atau cabang bank. Masyarakat juga bisa menghubungi bank masing-masing melalui layanan yang disediakan.

"Kami terus mendorong percepatan layanan ini, sambil memastikan bahwa kedepan rekening yang dilepas benar-benar aman dari potensi penyalahgunaan," ucapnya.

Sebelumnya, publik digegerkan dengan kebijakan pemblokiran rekening oleh PPATK. PPATK beralasan pemblokiran untuk mencegah penyalahgunaan rekening dormant untuk tindak kejahatan.

PPATK mengaku telah menemukan Rp1,15 triliun uang terkait tindak pidana kejahatan dari pemblokiran itu. Uang-uang itu tersebar di 1.155 rekening.**(cnni/js)**

Anggota Ormas di Medan Diculik dan Dibunuh .....

Dari Halaman 1

SSL.

Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh mengatakan tujuh tersangka yang ditangkap antara lain M (yang menjadi eksekutor), AFP, SP, ZI, II, A, dan AB. Sementara Iskandar Daud yang merupakan otak pelaku masih buron (DPO).

"Sebanyak tujuh tersangka berhasil ditangkap, sementara satu pelaku utama masih dalam pengejaran," kata Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh, Senin (11/8).

Kombes Pol Ricko mengatakan kasus ini terjadi pada Selasa (8/4) sekitar pukul 03.00 WIB di pelataran parkir Diskotik Blue Star, Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kota Binjai.

"Korban disergap oleh para tersangka, ditusuk, lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil sedan untuk kemudian dibawa ke Aceh dan dibuang ke laut," jelasnya.

Menurut Kombes Pol Ricko motif pembunuhan berawal dari penagihan utang pembayaran narkotika. Kemudian Iskandar Daut memerintahkan anak buahnya untuk menculik dan menghabisi nyawa korban.

"Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka terlebih dahulu mendatangi rumah korban pada 6 April 2025 malam, namun gagal menemukannya," paparnya.

Dia menambahkan dua hari kemudian, M mendapat informasi korban berada di Diskotik Blue Star. Lalu tersangka merusak ban mobil korban, mencegatnya, dan menusuk paha korban dengan sangkur.

"Korban kemudian dimasukkan ke bagasi mobil dan dibawa ke Bireuen, Aceh. Di sana, sejumlah tersangka lain sudah menunggu untuk membuang korban ke laut," paparnya.

Sebelum dibuang, jasad korban dibungkus karung, diikat dengan batu sebagai pemberat, lalu diangkut menggunakan perahu ke tengah laut Pante Rheng, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen.

"Polda Sumut bergerak cepat setelah menerima laporan dari istri korban, Pipit Widari, pada 25 April 2025," sebutnya.

Tim Jatanras Ditreskrimum melakukan penyelidikan intensif hingga berhasil menangkap tujuh tersangka di berbagai lokasi, termasuk di Langsa, Aceh Timur, dan pintu tol Helvetia, Medan.

"Barang bukti yang diamankan antara lain mobil Honda Civic, sepeda motor, senjata tajam, pakaian pelaku, dan handphone," sebutnya

Kombes Pol Ricko menjelaskan para tersangka dijerat Pasal 328 KUHP tentang penculikan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

"Otak pelaku sudah diketahui, cepat atau lambat tersangka pasti ditangkap. Kita minta pelaku segera menyerahkan diri," tegas Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh.**(A-10)**

Rusia Kecam Rencana Israel Perluas Operasi .....

Dari Halaman 1

Reuters, Minggu (10/8/2025).

Dilansir Anadolu, Rusia menambahkan, jika rencana tersebut dijalankan Israel, maka kemungkinan penduduk sipil di Gaza tidak akan tersisa. Menurut Rusia semua penduduk dapat berpotensi jadi sasaran pengusiran paksa.

"Diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan ada satu pun warga sipil yang tersisa di wilayah tersebut. Semua penduduk akan menjadi sasaran pengusiran paksa. Pihak Israel tidak menyembunyikan niatnya untuk secara bertahap merebut dan menduduki seluruh sektor tersebut pada tahap-tahap selanjutnya," demikian pernyataan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga memperingatkan tindakan tersebut akan mempersulit upaya internasional untuk meredakan ketegangan di zona konflik, yang akan mengakibatkan konsekuensi negatif yang serius bagi seluruh Timur Tengah. Rusia mengingatkan pentingnya melakukan gencatan senjata di Gaza.

"Rusia menegaskan kembali posisi konsistennya mengenai perlunya gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera dan tahanan, serta pemulihan akses kemanusiaan tanpa hambatan," tegasnya.

Rusia menekankan penyelesaian masalah Palestina hanya mungkin dilakukan berdasarkan dasar hukum internasional yang telah ditetapkan, yang berpusat pada prinsip dua negara, yang membayangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka di dalam perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan hidup berdampingan secara damai dan aman di samping Israel.

Netanyahu Bertekad Bebaskan Gaza dari Hamas

Berdasarkan rencana yang baru disetujui kabinet Israel untuk mengalahkan kelompok Hamas, pasukan Israel akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza, sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.

Namun, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah unggahan di media sosial X, menegaskan "kami tidak akan menduduki Gaza -- kami akan membebaskan Gaza dari Hamas".

Ia mengatakan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan "pemerintahan sipil yang damai... akan membantu membebaskan para sandera kami" dan mencegah ancaman di masa mendatang.

Israel menduduki Gaza sejak tahun 1967, tetapi menarik pasukan dan para pemukimnya pada tahun 2005.

Kantor Netanyahu mengatakan pada Jumat (8/8) waktu setempat, kabinet telah mengadopsi "lima prinsip", yakni perlucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.**(det/js)**

Di Deliserdang: Sampah Menggunung, ...

Dari Halaman 1

lokasi 'pembuangan akhir' tanpa pengawasan. Bahkan warga sendiri sudah tak heran jika setiap pagi mereka melewati aroma busuk menyengat tanpa ada upaya berarti dari pemerintah untuk menanganinya.

Pemandangan ini bukan baru kemarin terjadi. Tahun demi tahun, gunungan sampah di daerah ini tumbuh seperti tumor ganas. Ironisnya, ini terjadi di salah satu kecamatan terpadat di Deliserdang, yang berbatasan langsung dengan Kota Medan. Seolah-olah Pemkab Deliserdang sudah mati rasa dengan citra buruk yang setiap hari bisa dilihat dan dihirup oleh ribuan warganya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang, sekitar Rp7 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan kebersihan di Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun anggaran 2024. Angka ini tentu tidak kecil. Tapi pertanyaan mendasarnya tetap menggantung, ke mana larinya anggaran sebesar itu?

Apakah dana sebesar itu hanya cukup untuk membayar petugas sapu jalan dan sewa truk angkut sampah? Apakah tidak ada alokasi untuk edukasi masyarakat, pengadaan TPS (tempat pembuangan sementara) yang layak, atau sistem pengangkutan yang lebih terjadwal? Atau jangan-jangan, sebagian besar dana itu justru habis untuk rapat-rapat perencanaan yang tak pernah melahirkan tindakan nyata?

Sampah memang bukan sekadar urusan estetika kota. Ini soal kesehatan, lingkungan hidup, dan harga diri pemerintah daerah. Ketika tumpukan sampah dibiarkan menumpuk tanpa solusi, maka sejatinya yang busuk bukan hanya sampahnya, tetapi juga nurani mereka yang digaji dari uang rakyat tapi tak becus menjalankan amanah.

Sudah waktunya masyarakat menuntut transparansi penggunaan anggaran dan pengawasan yang ketat atas kinerja dinas kebersihan. Jika tidak, Deliserdang akan terus menjadi kabupaten dengan reputasi jorok yang tak kunjung selesai ditata.

Dalam pandangan Islam, kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa "Kebersihan adalah separuh dari iman." Maka, ketika umat Islam membiarkan sampah merajalela di lingkungannya, apalagi para pemimpin yang gagal menjaganya, maka sesungguhnya mereka telah lalai dari tanggung jawab yang bersifat spiritual sekaligus sosial.**(*)**

Menjaga Laut, Menjaga Martabat

Dari Halaman 1

Keputusan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memulai joint development atau pengelolaan bersama Ambalat patut dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, ini adalah langkah pragmatis—mengubah sengketa menjadi peluang kerja sama sambil menunggu penyelesaian hukum. Di sisi lain, langkah ini menyimpan risiko jika tak dibarengi dengan penguatan posisi hukum dan kehadiran nyata Indonesia di lapangan.

Kedaulatan Tidak Bisa Dinegosiasikan

Pengelolaan bersama bukanlah pengakuan batas wilayah. Batas laut Indonesia–Malaysia di sekitar Ambalat hingga kini belum disepakati secara formal. Dalam situasi seperti ini, setiap gestur simbolik punya bobot strategis. Penolakan Malaysia terhadap istilah "Ambalat" dan dorongan mereka agar digunakan sebutan "Laut Sulawesi" adalah bagian dari perang narasi. Nama bukan sekadar label; ia membentuk persepsi publik internasional dan bisa memengaruhi posisi hukum di masa depan.

Indonesia harus berhati-hati agar pragmatisme ekonomi tidak menggerus prinsip kedaulatan. Jika narasi dan simbol dibiarkan bergeser, kita bisa saja menemukan diri kita berada pada posisi tawar yang lebih lemah saat negosiasi final dilakukan.

Dalam hukum dan praktik internasional, klaim kedaulatan yang kuat sering kali bergantung pada kehadiran nyata di wilayah sengketa. Artinya, selain diplomasi meja perundingan, Indonesia perlu mengintensifkan patroli TNI AL, membangun fasilitas navigasi, dan mempercepat eksplorasi oleh BUMN migas. Kehadiran fisik yang konsisten akan mempertegas bahwa Ambalat memang bagian dari yurisdiksi kita, bukan sekadar klaim di atas kertas.

Kehadiran ini bukan untuk memprovokasi atau mengeskalasi konflik, melainkan untuk mengirim pesan jelas: Indonesia serius menjaga wilayahnya, sambil tetap menghormati jalur diplomasi damai.

Negosiasi tentang Ambalat telah berlangsung setidaknya 43 kali sejak 2005. Fakta ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah batas laut di kawasan tersebut. Namun, diplomasi damai bukan berarti kita bersikap pasif atau kompromistis secara berlebihan. Sebaliknya, diplomasi yang efektif justru memerlukan posisi tawar yang kuat—dan itu hanya bisa dibangun dengan data, bukti historis, dan tindakan strategis di lapangan.

Di sinilah pentingnya joint development yang transparan. Kerja sama ekonomi memang bisa menjadi jembatan untuk mengurangi ketegangan, tetapi mekanismenya harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberi celah bagi interpretasi yang merugikan. Setiap klausul harus jelas, akuntabel, dan memuat pengamanan bagi kepentingan nasional jangka panjang.

Kita bisa belajar dari dinamika Laut Cina Selatan. Di sana, klaim tumpang tindih antarnegara sering kali memanfaatkan "fakta di lapangan" sebagai modal politik. Siapa yang membangun pulau buatan, mengibarkan bendera, atau melakukan eksplorasi aktif, dialah yang dianggap "menguasai" wilayah tersebut. Indonesia memang bukan pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan, tetapi logika yang sama berlaku di Ambalat.

Ambalat bukan sekadar potensi ekonomi. Ia adalah simbol kemampuan bangsa menjaga wilayahnya di tengah tekanan geopolitik. Memilih jalur damai adalah keputusan tepat—tetapi damai harus berjalan seiring dengan ketegasan. Diplomasi tanpa kedaulatan adalah omong kosong, sementara kedaulatan tanpa diplomasi hanya akan memicu ketegangan.

Ke depan, Indonesia perlu memadukan tiga strategi: memperkuat kehadiran fisik, mengawal narasi dan simbol, serta merancang mekanisme joint development yang tidak melemahkan posisi hukum. Dengan begitu, Ambalat dapat menjadi contoh bahwa sengketa batas tidak selalu berakhir dengan konflik, tetapi bisa diselesaikan dengan kehormatan dan kecerdasan.

Menjaga Ambalat berarti menjaga laut kita. Menjaga laut berarti menjaga martabat kita.